



# Konsep Note Green Climate Fund (GCF) Aksi Mitigasi dan Adaptasi Berbasis Lahan Melalui Pendekatan Yurisdiksi di Kalimantan Barat

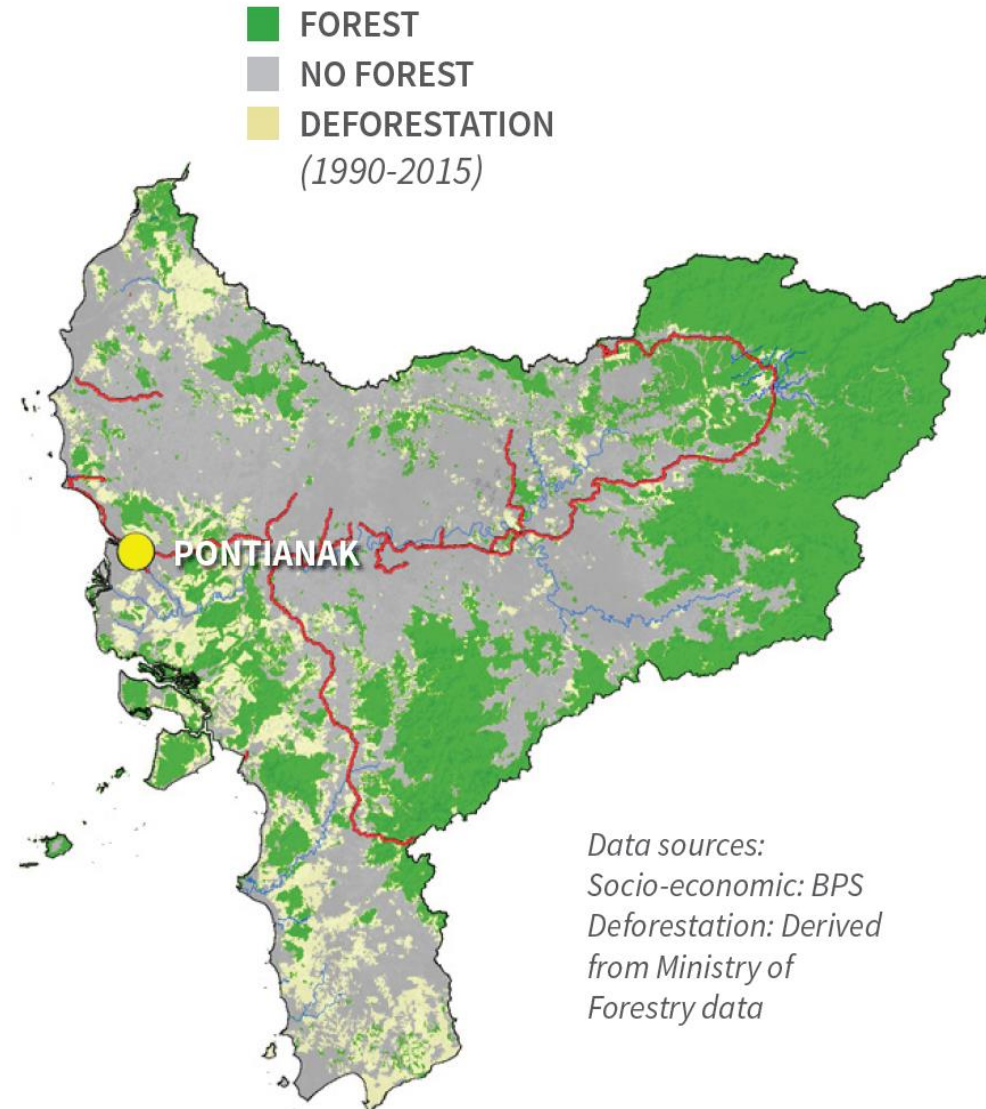
**Diusulkan Oleh :**  
**Pokja REDD+ Kalimantan Barat and GIZ**



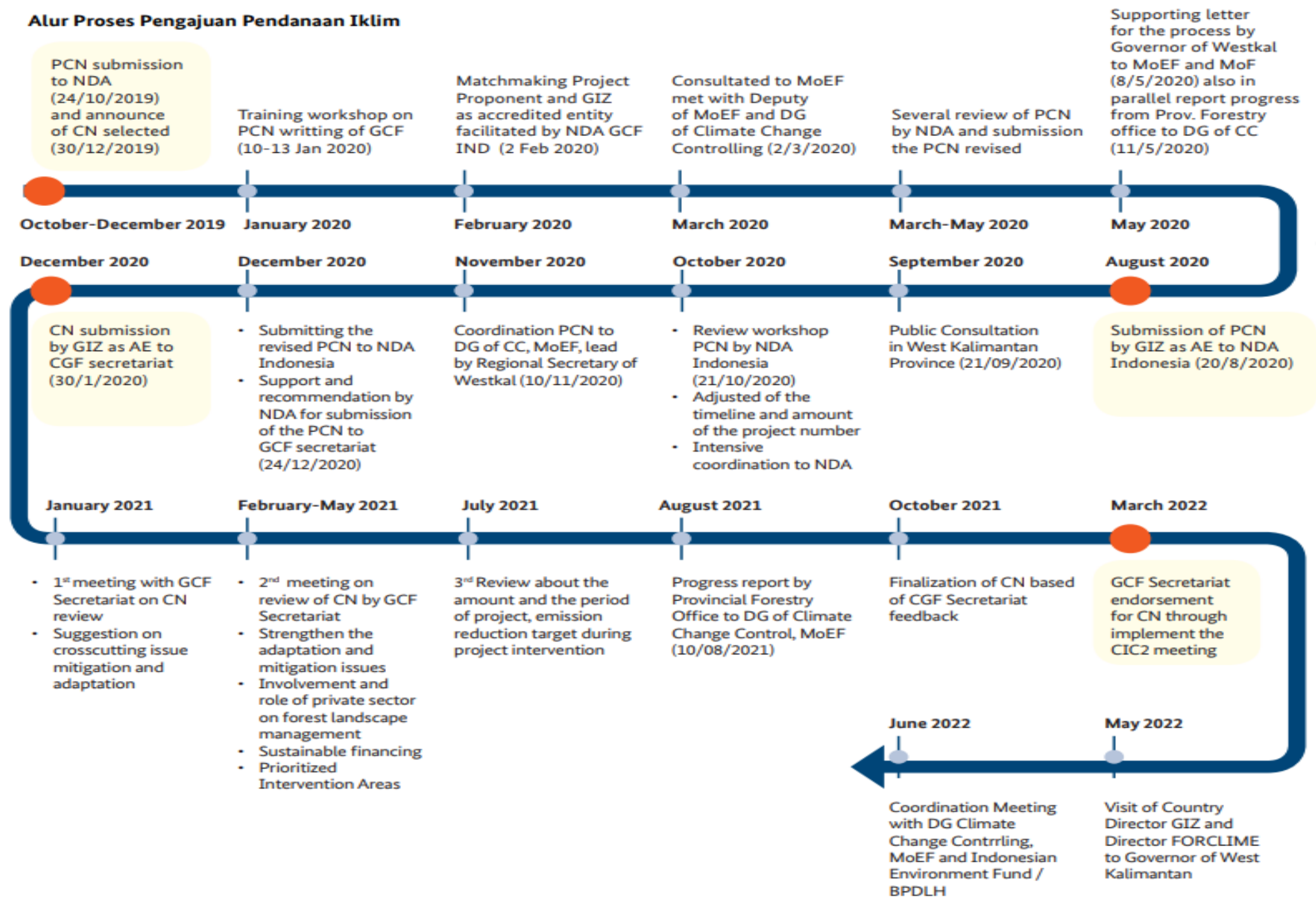
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

## Lokasi Proyek

- **Kalimantan Barat** Provinsi Ke-3 terluas di Indonesia, dengan luasan 14.6 juta hektar and dan menjadi salah satu titik deforestasi di Indonesia
- **Hutan** berkurang sebesar 27% dari 7.5 juta hektar di tahun 1990 hingga 5.5 hektar ha di tahun 2018, dengan rata-rata deforestasi 69,000 hektar/tahun dan 11,000 hektar/tahun untuk degradasi hutan
- Tingkat FREL sebesar 23.3 mtCO<sub>2</sub>eq/tahun
- **Gambut** meliputi luasan lebih dari 1.6 Juta hektar
- Emisi tahunan dari dekomposisi gambut meningkat dari 33.7 mtCO<sub>2</sub>eq (2012) hingga 38.2 mtCO<sub>2</sub>eq (2018)
- **Lima Kabupaten Prioritas:** Kapuas Hulu, Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, Sintang



## Alur Proses Pengajuan Pendanaan Iklim



## Nilai dan Indikatif Proposal Pendanaan dari Green Climate Fund

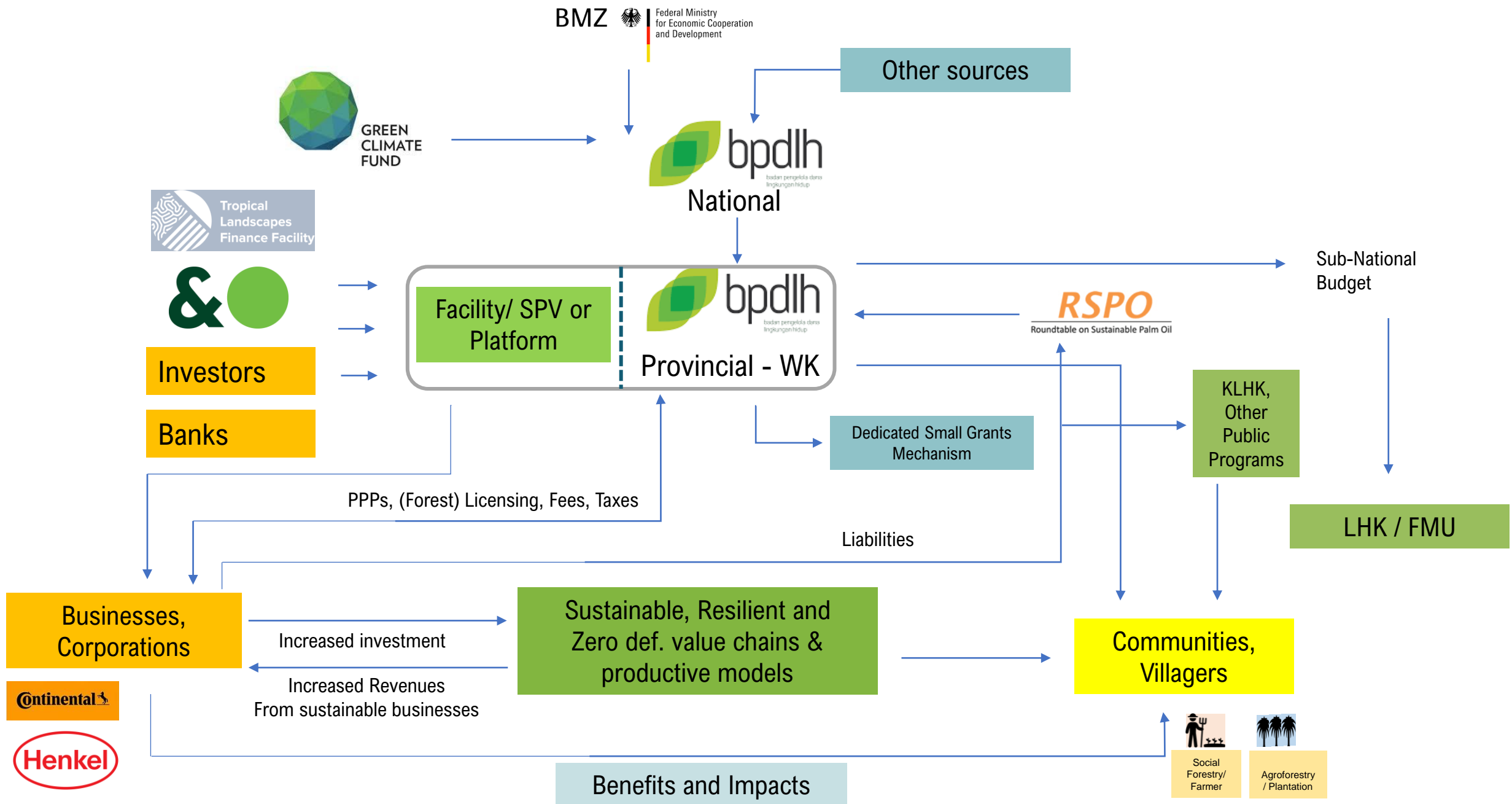
- Indikatif Pembiayaan Proyek untuk 7 tahun
- GCF Fund diusulkan untuk aksi mitigasi dan adaptasi Provinsi Kalimantan Barat



Total Proposal	: Euro 74 juta
GCF	: Euro 39 juta
Co-financing	: Euro 35 juta

### Proyeksi Penurunan Emisi dari Aksi Mitigasi

11,79 million tCO<sub>2eq</sub> : (proyeksi selama intervensi proyek → 7 tahun)



# Implikasi Desain dan Keluaran Proyek

## Penguatan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan untuk Perencanaan Lansekap yang terhubung Iklim

1.1 Pengarusutamaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dlm Rencana Pembangunan Daerah dan Perencanaan Tata Guna Lahan ditingkat Lokal.

1.2 Memperkuat Kerangka Kelembagaan untuk memastikan Perencanaan Tingkat Lansekap Berkelanjutan untuk Pembangunan Rendah Emisi dan Tahap Iklim.

1.3 Memperkuat Kerangka Hukum dan Perlindungan HCV/HCS pada Tutupan Hutan di APL seluas 100,000 ha.

1.4 Memerbaiki Sistem MRV di tingkat Provinsi termasuk Pemantauan Dampak Adaptasi.

1.5 Mengembangkan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Publik Lokal Yang Berkelanjutan untuk Pengelolaan Hutan dan Lansekap yang tahap iklim dan rendah emisi.

## Praktek Pertanian yang Tahan Iklim dan Rendah Emisi

Activity 2.1. Menerapkan dan Meningkatkan Pendekatan yang telah terbukti dari Pengembangan Komoditas Utama rendah emisi dan tahan iklim yang berkelanjutan

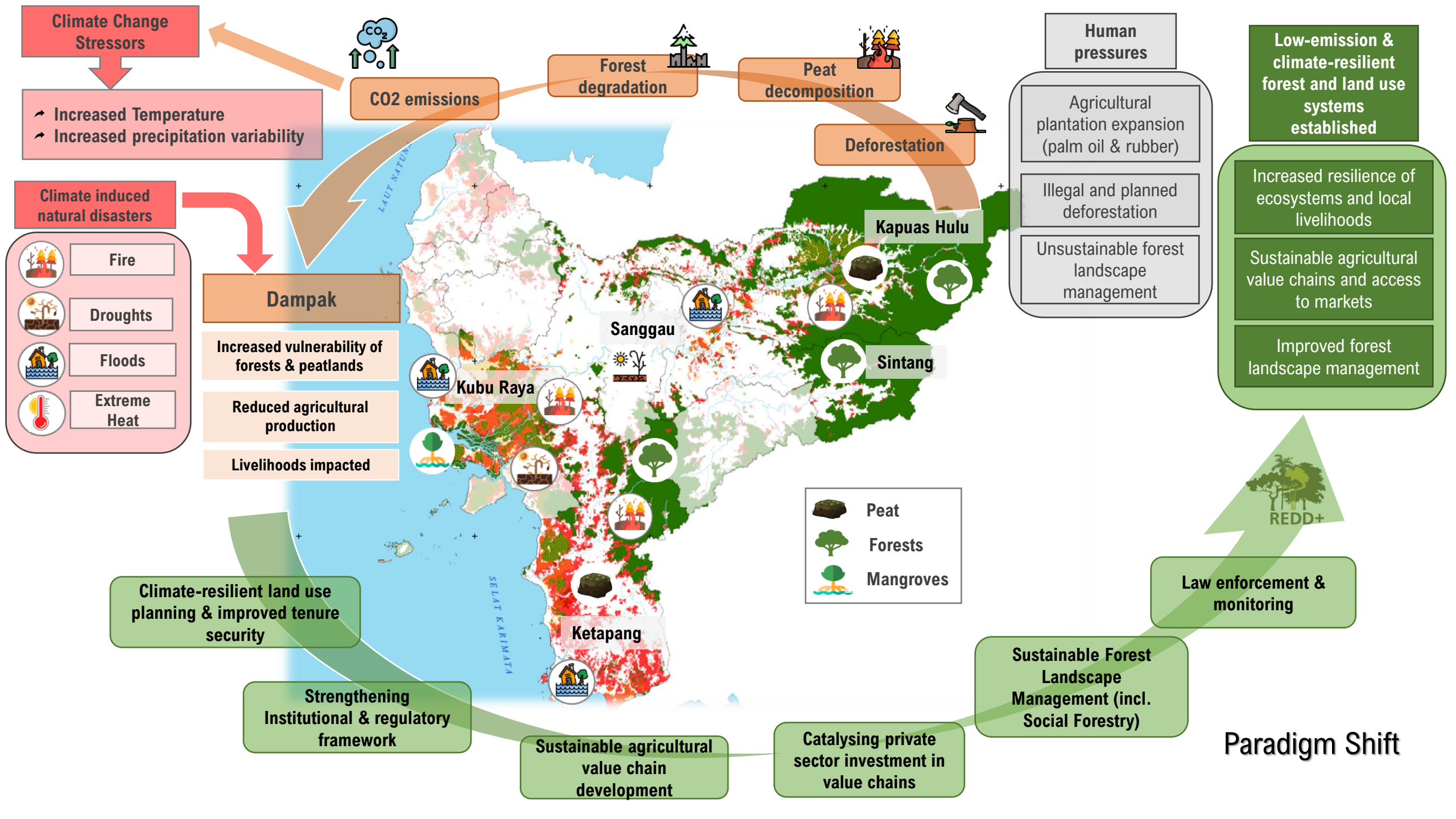
Activity 2.2 Meningkatkan dialog dan platform multipihak untuk pertanian dan investasi sector swasta yang rendah emisi dan tahan iklim

## Pengelolaan Hutan dan Lansekap Berbasis Masyarakat

Activity 3.1 Mendukung KPH dalam Penerapan dan Perencanaan Pengelolaan Hutan Berbasis Iklim termasuk dalam Pengelolaan kebakaran.

Activity 3.2 Meningkatkan pengembangan perhutanan social termasuk membangun kesadaran masyarakat terkait praktek pengurangan resiko dan resiko perubahan iklim.

**Memperkuat Ketahanan Masyarakat Pedesaan Produsen Skala Kecil dan Ekosistem Yang Rentan selain Dampak Mitigasi Proyek**



## Delivering on the Investment Criteria of the Green Climate Fund

50% mitigation 50% adaptation



- **Potensial Dampak:** 11.78 million tCO<sub>2</sub>eq (Diperkirakan Durasi project selama 7 Tahun); Sekitar. **205,000 villagers (laki-laki dan perempuan) yang bertempat tinggal di 200 desa** (termasuk dampak adaptasi)
- **Potensi Perubahan Paradigma:** Mengembangkan Model Bisnis dan Mata Pencaharian yang Berkelanjutan sambil menciptakan kerangka kelambagaan yang efektif yang mendorong dan mendukung kebijakan Kebijakan dan Regulasi yang ada.
- **Pembangunan Berkelanjutan dan Manfaat Tambahan:** Peningkatan matapencaharian, **Memperkuat Ketahanan Iklim**, Kualitas Tanah, Keamanan Tenurial, Retensi Air, Perlindungan Kehati, Mengurangi Ancaman Kebakaran, **Kesehatan dan Keamanan Pangan.**
- **Kebutuhan Penerima:** Emisi yang Tinggi dari Deforestasi dan Konversi Lahan Gambut; 50% adalah desa Sangat tertinggal; Kebutuhan untuk Mengembangkan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
- **Kepemilikan Negara:** Ide Proyek dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkonsultasi dengan Kementerian LHK yang didukung oleh NDA Indonesia, Sejalan dengan NDC, **Rencana Adaptasi Nasional**, Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau dalam Yurisdiksi dan Rencana Aksi REDD+ Kalimantan Barat
- **Efisiensi dan Efektifitas:** EUR 1.655 per tCO<sub>2</sub>eq (mitigation share 50% GCF Financing) = EUR 3.311 per tCO<sub>2</sub>eq (39million/11.78 milliontCO<sub>2</sub>eq from GCF Funding) = EUR 6.268 per tCO<sub>2</sub>e (74 million/11.78 milliontCO<sub>2</sub>eq from GCF + co-funding) (angka termasuk dampak adaptasi)



# TERIMA KASIH



**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

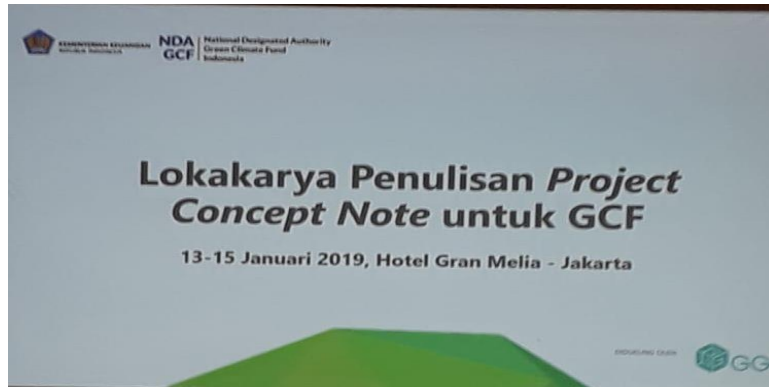


Foto 1 dan 2 Lokakarya Penulisan Project Concept Note untuk GCF oleh NDA Indonesia, pada 13-15 Januari 2020, Hotel Gran Melia, Jakarta



Foto 3 dan 4\_Match Making dengan Accredited Entity GIZ, difasilitasi NDA Indonesia pada 2 February 2020 di Kantor Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Jakarta



Foto 5 dan 6 ; Konsultasi dan Komunikasi ke Wakil Menteri LHK dan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Tentang penyusunan PCN Kalbar pada 2 Maret 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Manggala Wanabakti, Jakarta



Foto 7 ; Konsultasi Penyusunan PCN kepada Dirjen PPI, Kementerian LHK 2 Maret 2020,



Foto 8 ; Konsultasi Penyusunan PCN kepada NDA Indonesia pada 3 Maret 2020, Badan Keijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI



Foto 9 dan 10 ; Diskusi Pokja REDD+ Kalimantan Barat, memperbaiki Konsep Note setelah review dari NDA Indonesia Pada 13 Maret 2021, di Pontianak



Foto 11 dan 12 ; Presentasi Update Perkembangan Konsep Note kepada Pemprov Kalbar, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten I Gubernur Kalbar, Kepala Biro Ekonomi Pada 21 September 2020, Hotel Mercure Pontianak



Foto 13 dan 14 ; Koordinasi dan Konsultasi Konsep Note GCF kepada Dirjen PPI, Kementerian LHK pada 10 Nopember 2020, Manggala Wanabakti, Jakarta

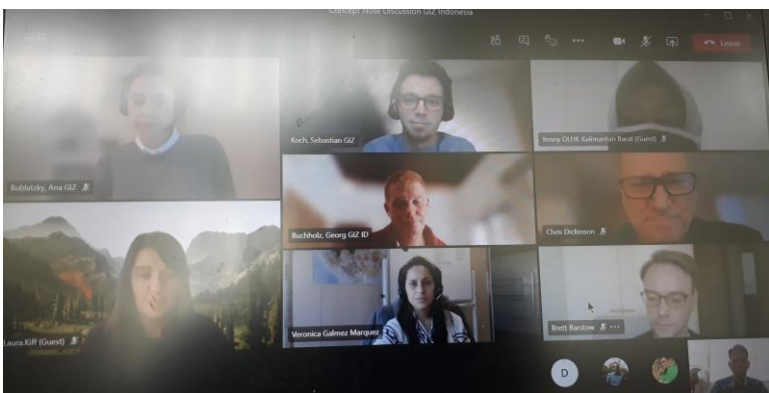


Foto 15 ; Meeting I dengan Sekretariat GCF diikuti oleh Dinas LHK, Pokja REDD+, Fahutan UNTAN dan GIZ



Foto 16 ; Koordinasi antara Pemprov (DisLHK, Pokja REDD, Fahutan, Ahli Ekonomi Kalbar, dengan GIZ HQ terkait Revisi PCN atas Masukan Sekretariat GCF